

ANALISIS DAYA DUKUNG MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PARIWISATA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi Pada Wilayah Minahasa, Mitra, Dan Boltim)

Oleh

Cynthia Maria Siwi¹, Ronald Jolly Pongantung², Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah³

Farisa Maulinam Amo⁴

^{1,2,3,4}universitas Terbuka Manado

E-mail: ¹mariaswi@ecampus.ut.ac.id, ²pongantung@ecampus.ut.ac.id,

³dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id, ⁴farisa@ecampus.ut.ac.id

Article History:

Received: 23-11-2024

Revised: 07-12-2024

Accepted: 26-12-2024

Keywords:

Daya Dukung Masyarakat,
Peningkatan Pariwisata,
Provinsi Sulawesi Utara

Abstract: Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pariwisata dengan produk wisata utama yaitu destinasi bahari (marine tourism). Pengembangan pariwisata di provinsi Sulawesi utara dalam pengelolaannya masih kurang memaksimalkan daya dukung masyarakat. Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana daya dukung masyarakat berhasil meningkatkan pariwisata provinsi Sulawesi utara khususnya di wilayah yang memiliki pesona pantai, yaitu; Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa utara, Kabupaten Minahasa tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui indikator partisipasi masyarakat dalam peningkatan pariwisata di Provinsi Sulawesi utara. Melalui kajian ini diharapkan mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam meningkatkan pariwisata provinsi Sulawesi utara khususnya wisata bahari.

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Regulasi ini menekankan bahwa keberadaan objek wisata di suatu daerah dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pelestarian alam dan budaya. Penyelenggaraan kepariwisataan menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota [1], [2], [3].

Salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang signifikan adalah Sulawesi Utara. Wilayah ini dikenal dengan destinasi wisata bahari unggulan seperti Taman Nasional Laut Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Lihaga, dan Likupang yang menawarkan keanekaragaman flora dan fauna bawah laut. Selain itu, terdapat pula objek wisata laut lainnya yang tersebar di Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Sangihe.

Namun, data menunjukkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya memulihkan sektor pariwisata melalui penguatan peran masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal berperan aktif dalam pengembangan destinasi wisata [4], [5].

Studi kasus di Miso Walay Homestay, Sabah, Malaysia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat lokal yang memahami kebutuhan dan potensi daerahnya dapat mengarahkan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka [6], [7].

Di Sulawesi Utara, pengembangan pariwisata belum sepenuhnya memanfaatkan daya dukung masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata masih minim. Padahal, partisipasi aktif mereka dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta berkelanjutan [8], [9].

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, seperti semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam, dapat menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, destinasi wisata dapat menawarkan pengalaman yang autentik bagi wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Pengembangan model pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Utara memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal, serta pembentukan kelembagaan yang mendukung partisipasi mereka. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak [9], [10], [11].

Dengan demikian, optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan daya saing destinasi, memperbaiki perekonomian lokal, dan menjaga kelestarian alam serta budaya daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan [12], [13].

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, serta mengembangkan model pariwisata berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan komunitas lokal. Dengan memahami dan memberdayakan peran masyarakat, diharapkan pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

LANDASAN TEORI

Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan merupakan kontribusi sukarela individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Partisipasi ini mencakup keterlibatan mental, emosional, dan fisik, di mana masyarakat tidak hanya hadir secara pasif tetapi juga aktif berperan dalam setiap tahapan pembangunan [14], [15].

Menurut teori partisipasi, terdapat beberapa bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan menentukan arah pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, yang melibatkan kontribusi nyata seperti tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan manfaat, di mana masyarakat merasakan langsung hasil dari pembangunan tersebut. Terakhir, partisipasi dalam evaluasi, di mana masyarakat turut menilai dan mengawasi hasil-hasil perencanaan yang telah dilaksanakan [16], [17].

Sherry Arnstein, dalam teorinya "Tangga Partisipasi", mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi masyarakat. Dimulai dari manipulasi dan terapi, yang dianggap sebagai non-partisipasi, hingga pemberitahuan dan konsultasi yang merupakan bentuk tokenisme. Tingkatan lebih tinggi meliputi peredaan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol warga negara, di mana masyarakat memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program [18], [19].

Penerapan teori Arnstein dalam konteks pembangunan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula kontrol dan pengaruh mereka terhadap hasil pembangunan. Pada tingkat kemitraan, misalnya, terjadi pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan keputusan bersama yang lebih efektif. Sementara itu, pada tingkat kontrol warga negara, masyarakat sepenuhnya memegang kendali atas proses dan hasil pembangunan [20], [21].

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal terpenuhi. Dengan terlibat langsung, masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan konteks dan budaya setempat, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan program [22], [23].

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat mendorong pemberdayaan individu dan komunitas. Melalui keterlibatan dalam berbagai tahapan pembangunan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini berkontribusi pada penguatan kapasitas lokal dan kemandirian komunitas dalam jangka Panjang [24], [25].

Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap ada, termasuk kurangnya informasi, keterampilan, atau kesempatan untuk terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif. Pendidikan, pelatihan, dan penyediaan platform untuk dialog merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong keterlibatan masyarakat [26], [27], [28].

Dalam konteks pembangunan pariwisata, misalnya, partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata dapat membantu melestarikan budaya dan lingkungan lokal, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara adil.

Peningkatan

Peningkatan merupakan proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Secara kuantitatif, peningkatan dapat dilihat dari bertambahnya jumlah atau kapasitas suatu objek atau fenomena. Misalnya, dalam konteks pariwisata, peningkatan kuantitas dapat berupa penambahan jumlah destinasi wisata atau fasilitas pendukungnya. Sementara itu, secara kualitatif, peningkatan berkaitan dengan perbaikan mutu atau nilai dari suatu objek atau layanan, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan atau perbaikan infrastruktur destinasi wisata [29], [30], [31].

Dalam konteks pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata menjadi fokus utama untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan kepuasan mereka. Peningkatan kuantitas dapat diwujudkan melalui pengembangan destinasi baru, penambahan fasilitas akomodasi, dan diversifikasi atraksi wisata. Sedangkan peningkatan kualitas melibatkan perbaikan layanan, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan [32], [33], [34].

Pentingnya peningkatan dalam pariwisata tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Peningkatan kualitas layanan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan, yang pada gilirannya mendorong promosi dari mulut ke mulut dan kunjungan ulang. Selain itu, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta budaya lokal, destinasi wisata dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat [35], [36].

Pariwisata

Pariwisata mencakup berbagai aktivitas perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok ke lokasi di luar lingkungan sehari-hari mereka untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau keperluan lain. Kegiatan ini bersifat sementara dan melibatkan interaksi dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan utama pariwisata adalah memenuhi kebutuhan akan hiburan, pengetahuan, dan pengalaman baru yang tidak ditemukan dalam rutinitas harian [37], [38].

Dalam praktiknya, pariwisata melibatkan beberapa komponen penting, seperti atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya. Atraksi wisata dapat berupa keindahan alam, situs budaya, atau acara khusus yang menarik minat pengunjung. Transportasi memfasilitasi pergerakan wisatawan dari tempat asal ke destinasi, sementara akomodasi menyediakan tempat tinggal sementara selama kunjungan. Layanan pendukung lainnya mencakup restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas rekreasi yang menambah kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama perjalanan mereka [39], [40].

Dengan demikian, pariwisata tidak hanya berfokus pada perjalanan itu sendiri, tetapi juga pada pengalaman menyeluruh yang diperoleh wisatawan. Hal ini mencakup interaksi

dengan lingkungan baru, budaya lokal, dan masyarakat setempat, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan wawasan dan apresiasi terhadap keragaman dunia. Selain itu, pariwisata juga memainkan peran signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan mendorong pelestarian budaya serta lingkungan [41], [42].

Wisata Bahari

Wisata bahari mencakup berbagai aktivitas rekreasi yang berfokus pada lingkungan laut dan pesisir. Kegiatan ini meliputi menikmati keindahan pantai, berenang, berlayar, berselancar, menyelam, ski air, dan berperahu layar. Atraksi wisata bahari sering kali memanfaatkan keindahan alam seperti taman laut dengan terumbu karang dan biota laut, formasi karang buatan, situs purbakala bawah laut, area penangkapan ikan, dan pantai yang mempesona [43], [44].

Pariwisata bahari telah lama diminati oleh berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Jenis pariwisata ini sering dikaitkan dengan konsep "matahari, laut, dan pasir," yang menawarkan kombinasi keindahan dan kenyamanan alami dari sinar matahari, lautan, dan pantai berpasir putih. Aktivitas yang umum dilakukan wisatawan dalam konteks ini antara lain berenang, berselancar, berjemur, menyelam, berdayung, snorkeling, berjalan atau berlari di sepanjang pantai, menikmati suasana pesisir yang damai, dan bermeditasi [45], [46], [47].

Beberapa kegiatan wisata bahari memanfaatkan wilayah pesisir dan laut secara langsung, seperti berperahu, berenang, snorkeling, menyelam, dan memancing. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi yang menyenangkan tetapi juga mendorong apresiasi terhadap keindahan dan kekayaan ekosistem laut. Dengan demikian, wisata bahari berperan penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir [48], [49], [50].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pariwisata bahari di Sulawesi Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan fokus pada makna dan interpretasi dari data yang dikumpulkan [51], [52], [53].

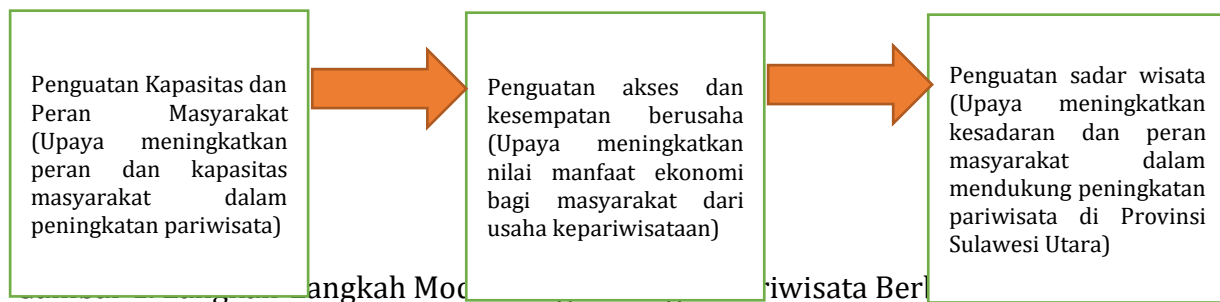
Lokasi penelitian mencakup Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur, yang dipilih berdasarkan potensi wisata bahari yang signifikan. Dari wilayah-wilayah tersebut, dipilih tiga sampel lokasi spesifik yang mewakili karakteristik khas masing-masing daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas wisata bahari dan interaksi masyarakat setempat. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan, termasuk penduduk lokal, pelaku industri pariwisata, dan pejabat pemerintah daerah, untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti laporan resmi, statistik pariwisata, dan materi promosi. Studi literatur dilakukan untuk memahami konteks teoretis dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini [54], [55].

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi. Validitas internal (credibility) dicapai melalui triangulasi sumber dan metode, memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Transferability (validitas eksternal) diperhatikan dengan memberikan deskripsi rinci sehingga temuan dapat diterapkan dalam konteks lain yang serupa. Dependability (reliabilitas) dijaga dengan mendokumentasikan proses penelitian secara sistematis, memungkinkan audit trail yang jelas. Confirmability (obyektivitas) dicapai dengan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data yang dikumpulkan, bukan dari bias peneliti [56], [57].

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan realitas yang diteliti. Oleh karena itu, teknik validasi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, partisipasi aktif dari 90 responden, dengan masing-masing 30 responden dari setiap wilayah sampel, memberikan data yang kaya dan beragam, memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai pariwisata bahari di Sulawesi Utara [58], [59], [60].

Pada tahun kedua penelitian, fokus akan beralih pada pengembangan model pariwisata berbasis masyarakat di Sulawesi Utara. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Desain pengembangan akan disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur dan komponen utama dari model yang diusulkan. Pendekatan partisipatif akan diterapkan dalam pengembangan model ini, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi pariwisata bahari di daerah tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Daya dukung masyarakat dalam pariwisata mencakup kesediaan, kemampuan, dan partisipasi aktif komunitas lokal dalam mendukung pengembangan serta keberlanjutan sektor pariwisata. Aspek ini meliputi sikap positif terhadap wisatawan, keterlibatan dalam pengelolaan destinasi, dan kemampuan menyediakan produk serta jasa wisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena mereka memiliki peran signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan warisan budaya, dan menggerakkan ekonomi lokal [61], [62].

Keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan mereka dalam proses persiapan dan perencanaan pembangunan, program

pembangunan cenderung tidak berhasil. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami dan mempercayai proses pembangunan, sehingga menciptakan perpaduan harmonis antara kegiatan pemerintah dan daya dukung masyarakat. Dalam konteks ini, daya dukung sosial berperan sebagai kerangka pengendalian dampak sosial pariwisata, dengan melibatkan peran pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam memberikan pemahaman terhadap pengaruh budaya asing yang masuk [63], [64].

Analisis daya dukung masyarakat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, daya dukung fisik yang mencakup infrastruktur seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas publik yang memadai untuk mendukung aliran wisatawan dan memastikan pengalaman yang baik bagi mereka. Kedua, daya dukung sosial yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, sehingga mereka dapat berperan sebagai pemandu wisata, pengusaha lokal, dan promotor pariwisata. Ketiga, daya dukung ekonomi yang memastikan pariwisata memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Keempat, daya dukung lingkungan yang memastikan bahwa pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan batasan daya dukung lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam [65], [66].

Hubungan antara pariwisata dan masyarakat lokal harus bersifat simbiotik, di mana keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, pariwisata dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan budaya lokal. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh generasi mendatang [67].

Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Kemajuan Pariwisata Daerah

Daya dukung masyarakat lokal memainkan peran krusial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan aktif komunitas setempat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa program pembangunan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap destinasi wisata, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik bagi wisatawan.

Selain itu, masyarakat lokal berperan penting dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan memahami nilai warisan budaya dan keindahan alam, mereka termotivasi untuk menjaga dan mempromosikan keduanya sebagai daya tarik wisata. Hal ini esensial untuk mempertahankan identitas lokal serta memastikan keberlanjutan ekosistem. Keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata juga dapat mendorong investasi dalam infrastruktur yang mendukung, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya, yang semuanya berkontribusi pada pengalaman wisata yang lebih baik.

Lebih lanjut, dengan menyediakan layanan berkualitas tinggi, seperti pemandu wisata lokal atau produk lokal yang menarik, masyarakat dapat meningkatkan daya tarik suatu destinasi. Ini tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga memperkaya pengalaman yang ditawarkan kepada mereka. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat lokal

dalam pariwisata sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara wisatawan dan komunitas setempat.

Melalui partisipasi aktif, pelestarian budaya, peningkatan infrastruktur, dan rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata, masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga alat untuk pelestarian budaya dan lingkungan.

Potensi Wisata Sulawesi Utara

Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, didukung oleh berbagai aspek yang menjadikannya destinasi menarik bagi wisatawan. Salah satu keunggulan utama adalah keramahan masyarakatnya. Penduduk lokal dikenal ramah dan terbuka terhadap pengunjung, yang tidak hanya menciptakan suasana hangat tetapi juga meningkatkan kepuasan wisatawan. Sikap ini membentuk persepsi positif, mendorong kunjungan ulang, dan memperkuat identitas daerah sebagai destinasi yang menyambut wisatawan dengan tangan terbuka.

Selain keramahan, kekayaan budaya Sulawesi Utara menjadi daya tarik tersendiri. Keberagaman tradisi, seni, dan kuliner khas menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Wisatawan dapat menikmati tarian tradisional, upacara adat, dan mencicipi hidangan lokal yang otentik. Kekayaan budaya ini tidak hanya menarik minat pengunjung tetapi juga berperan dalam pelestarian warisan budaya, memperkuat identitas daerah, dan membuka peluang pengembangan produk wisata berbasis budaya.

Keindahan alam Sulawesi Utara, seperti Taman Nasional Bunaken, Cagar Alam Tangkoko, dan dataran tinggi Minahasa, menambah daya tarik pariwisata daerah ini. Destinasi-destinasi ini menawarkan panorama alam yang memukau, mulai dari keindahan bawah laut hingga keanekaragaman hayati darat. Potensi alam ini memungkinkan pengembangan berbagai jenis wisata, seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata edukasi, yang dapat menarik berbagai segmen wisatawan.

Dengan kombinasi keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan keindahan alam, Sulawesi Utara memiliki modal kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, pelestarian budaya, dan konservasi alam menjadi kunci sukses dalam memaksimalkan potensi ini. Melalui strategi yang tepat, pariwisata dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal.

Kontribusi Komunitas Lokal terhadap Kemajuan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlibatan mereka dalam menyediakan layanan seperti homestay dan pemandu wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dengan nuansa lokal yang autentik. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya dan lingkungan memastikan bahwa tradisi dan ekosistem lokal tetap terjaga. Dengan menjaga dan mempromosikan warisan budaya, masyarakat dapat menarik wisatawan yang tertarik pada pengalaman budaya yang otentik. Upaya konservasi lingkungan oleh komunitas lokal juga penting untuk menjaga keindahan alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan terlibat dalam sektor ini, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha baru yang mendukung perekonomian lokal. Misalnya, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan, kuliner, dan jasa pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penduduk setempat [68], [69].

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam operasionalisasi pariwisata.

Secara keseluruhan, peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pariwisata di Sulawesi Utara menjadi kunci sukses dalam memajukan sektor ini, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh komunitas lokal. Dengan demikian, pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan, melestarikan budaya dan lingkungan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Inisiatif Lokal dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang memikat. Namun, pengembangan sektor ini memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal tetapi juga memastikan bahwa tradisi dan lingkungan setempat terjaga. Dengan menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin souvenir, penduduk setempat dapat langsung merasakan manfaat ekonomi sambil mempromosikan budaya mereka kepada pengunjung [70], [71].

Pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong inisiatif ini melalui pendidikan dan pelatihan. Program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas akan memfasilitasi partisipasi komunitas lokal dalam industri pariwisata [72].

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang harmonis. Dengan bekerja sama, mereka dapat merancang strategi yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kepentingan

penduduk setempat [73], [74], [75].

Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif akan menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa pariwisata berkembang secara berkelanjutan, menghormati budaya, dan melestarikan keindahan alam daerah tersebut.

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional

Pengembangan pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menekankan bahwa keberadaan objek wisata di suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, kesadaran lingkungan, serta pelestarian alam dan budaya. Penyelenggaraan kepariwisataan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan peluang bagi pembangunan wisata berbasis masyarakat secara desentralisasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, yang paling memahami kebutuhan, persoalan, dan potensi dalam pengembangan destinasi wisata.

Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan potensi pariwisata yang signifikan dan berdaya saing. Objek wisata unggulannya meliputi wisata bahari di Taman Nasional Laut Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Lihaga, dan Likupang, yang terkenal dengan keanekaragaman flora dan fauna bawah laut. Selain itu, terdapat pula objek wisata laut lainnya yang tersebar di Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Sangihe.

Data menunjukkan adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2022 akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata, pemerintah menekankan penguatan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal menjadi indikator penting dalam meningkatkan pariwisata di provinsi ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata masih perlu ditingkatkan.

Salah satu contoh penerapan prinsip pariwisata berbasis masyarakat adalah Miso Walay Homestay di Sabah, Malaysia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai aktor inti memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pengembangan wisata harus didorong untuk mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata guna memenuhi kebutuhan lokal.

Analisis daya dukung masyarakat dalam peningkatan pariwisata di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah dengan potensi wisata bahari seperti Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, dan Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan melalui indikator partisipasi masyarakat. Hal ini mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pariwisata. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengembangan pariwisata menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi komunitas lokal.

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan rasa

cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga dan mempromosikan kekayaan alam dan budaya daerah mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata akan memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Dengan demikian, analisis daya dukung masyarakat dalam peningkatan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara menjadi langkah penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci sukses dalam pengembangan destinasi wisata yang menarik dan lestari.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran krusial masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek pariwisata telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan seperti homestay dan pemandu wisata telah meningkatkan pendapatan lokal serta memperkaya pengalaman wisatawan dengan nuansa autentik.

Selain itu, kesadaran dan upaya masyarakat dalam melestarikan budaya dan lingkungan setempat memastikan bahwa tradisi dan ekosistem lokal tetap terjaga. Hal ini penting untuk mempertahankan daya tarik destinasi wisata dan mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata juga telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha baru yang mendukung perekonomian lokal.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pariwisata di Sulawesi Utara menjadi kunci sukses dalam memajukan sektor ini, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh komunitas lokal.

Untuk meningkatkan daya dukung masyarakat dalam pengembangan pariwisata, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program pelatihan dan edukasi. Peningkatan kapasitas dalam manajemen pariwisata, pelayanan pelanggan, dan pelestarian lingkungan akan memperkuat peran masyarakat dalam industri ini. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, seperti akses permodalan dan pemasaran bagi usaha kecil di sektor pariwisata.

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, pariwisata di Sulawesi Utara dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. E. A. Saputro, Hasim, L. Karlinasari, and I. S. Beik, "Evaluation of Sustainable Rural Tourism Development with an Integrated Approach Using MDS and ANP Methods: Case Study in Ciamis, West Java, Indonesia," *Sustainability*, vol. 15, no. 3, p. 1835, Jan. 2023, doi: 10.3390/su15031835.
- [2] A. Purwoko, D. R. Nurrochmat, M. Ekayani, S. Rijal, and H. L. Garura, "Examining the Economic Value of Tourism and Visitor Preferences: A Portrait of Sustainability Ecotourism in the Tangkahan Protection Area, Gunung Leuser National Park, North Sumatra, Indonesia," *Sustainability*, vol. 14, no. 14, p. 8272, Jul. 2022, doi: 10.3390/su14148272.
- [3] D. Syafrini, M. Fadhil Nurdin, Y. S. Sugandi, and A. Miko, "The impact of multiethnic cultural tourism in an Indonesian former mining city," *Tour. Recreat. Res.*, vol. 45, no. 4, pp. 511–525, Oct. 2020, doi: 10.1080/02508281.2020.1757208.
- [4] N. P. B. W. Antari and D. Connell, "Tukad Bindu in Bali, Indonesia: ecotourism or greenwashing?," *Int. J. Tour. Cities*, vol. 7, no. 4, pp. 1049–1075, Dec. 2021, doi: 10.1108/IJTC-12-2020-0285.
- [5] E. Djuwendah, T. Karyani, E. Wulandari, and P. Pradono, "Community-Based Agro-Ecotourism Sustainability in West Java, Indonesia," *Sustainability*, vol. 15, no. 13, p. 10432, Jul. 2023, doi: 10.3390/su151310432.
- [6] E. Maylinda and S. Sudarmono, "PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA ADAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI," *J. Environ. Sci.*, vol. 4, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.35580/jes.v4i1.20452.
- [7] R. Saputra, "Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage," *J. Ethn. Cult. Stud.*, vol. 11, no. 3, pp. 25–50, Jul. 2024, doi: 10.29333/ejecs/2145.
- [8] F. Ferdian *et al.*, "Driving Sustainable Tourism Villages: Evaluating Stakeholder Commitment, Attitude, and Performance: Evidence from West Sumatra, Indonesia," *Sustainability*, vol. 16, no. 14, p. 6066, Jul. 2024, doi: 10.3390/su16146066.
- [9] S. Pickel-Chevalier, I. K. G. Bendesa, and I. N. Darma Putra, "The integrated touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism?," *Tour. Geogr.*, vol. 23, no. 3, pp. 623–647, May 2021, doi: 10.1080/14616688.2019.1600006.
- [10] R. A. Praptiwi *et al.*, "Tourism-Based Alternative Livelihoods for Small Island Communities Transitioning towards a Blue Economy," *Sustainability*, vol. 13, no. 12, p. 6655, Jun. 2021, doi: 10.3390/su13126655.
- [11] C. Dolezal and M. Novelli, "Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali," *J. Sustain. Tour.*, vol. 30, no. 10, pp. 2352–2370, Oct. 2022, doi: 10.1080/09669582.2020.1838527.
- [12] J. K. L. Chan, K. M. Marzuki, and T. M. Mohtar, "Local Community Participation and

- Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah," *Sustainability*, vol. 13, no. 23, p. 13302, Dec. 2021, doi: 10.3390/su132313302.
- [13] S. Priatmoko, M. Kabil, Y. Purwoko, and L. D. Dávid, "Rethinking Sustainable Community-Based Tourism: A Villager's Point of View and Case Study in Pampang Village, Indonesia," *Sustainability*, vol. 13, no. 6, p. 3245, Mar. 2021, doi: 10.3390/su13063245.
- [14] T. Waldron *et al.*, "Development of a program theory for shared decision-making: a realist synthesis," *BMC Health Serv. Res.*, vol. 20, no. 1, p. 59, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12913-019-4649-1.
- [15] D. Mabetha *et al.*, "Realising radical potential: building community power in primary health care through Participatory Action Research," Nov. 30, 2022. doi: 10.21203/rs.3.rs-2292188/v1.
- [16] S. J. Youn *et al.*, "Practical solutions for sustaining long-term academic-community partnerships," *Psychotherapy*, vol. 56, no. 1, pp. 115–125, Mar. 2019, doi: 10.1037/pst0000188.
- [17] N. I. Varallyay, E. V. Langlois, N. Tran, V. Elias, and L. Reveiz, "Health system decision-makers at the helm of implementation research: development of a framework to evaluate the processes and effectiveness of embedded approaches," *Heal. Res. Policy Syst.*, vol. 18, no. 1, p. 64, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12961-020-00579-9.
- [18] M. Arthur, R. Saha, and A. Kapilashrami, "Community participation and stakeholder engagement in determining health service coverage: A systematic review and framework synthesis to assess effectiveness," *J. Glob. Health*, vol. 13, p. 04034, May 2023, doi: 10.7189/jogh.13.04034.
- [19] J. Sitienei, L. Manderson, and M. Nangami, "Community participation in the collaborative governance of primary health care facilities, Uasin Gishu County, Kenya," *PLoS One*, vol. 16, no. 3, p. e0248914, Mar. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0248914.
- [20] V. Haldane *et al.*, "Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes," *PLoS One*, vol. 14, no. 5, p. e0216112, May 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0216112.
- [21] E. D. Perera, M. Moglia, and S. Glackin, "Beyond 'Community-Washing': Effective and Sustained Community Collaboration in Urban Waterways Management," *Sustainability*, vol. 15, no. 5, p. 4619, Mar. 2023, doi: 10.3390/su15054619.
- [22] N. Hippalgaonkar *et al.*, "Are We the Problem? A Call to Action for Addressing Institutional Challenges to Engaging Community Partners in Research," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 21, no. 2, p. 236, Feb. 2024, doi: 10.3390/ijerph21020236.
- [23] C.-C. Liu, C.-Y. Yang, and P.-Y. Chao, "A longitudinal analysis of student participation in a digital collaborative storytelling activity," *Educ. Technol. Res. Dev.*, vol. 67, no. 4, pp. 907–929, Aug. 2019, doi: 10.1007/s11423-019-09666-3.
- [24] A. Silverstein, A. Benson, C. Gates, and D. Nguyen, "Global community of practice: A means for capacity and community strengthening for health professionals in low- and middle-income countries," *J. Glob. Health*, vol. 12, p. 04034, May 2022, doi: 10.7189/jogh.12.04034.

- [25] E. Arvanitis, "Educating 'others': Drawing on the collective wisdom of intercultural experts," *Br. Educ. Res. J.*, vol. 47, no. 4, pp. 922–941, Aug. 2021, doi: 10.1002/berj.3731.
- [26] R. Magnussen, V. D. Hamann, and A. G. Stensgaard, "Educating for co-Production of Community-Driven Knowledge," *Electron. J. e-Learning*, vol. 17, no. 3, Sep. 2019, doi: 10.34190/JEL.17.3.005.
- [27] X. Cheng, S. Fu, G.-J. de Vreede, and Y. Li, "Using Collaboration Engineering to Mitigate Low Participation, Distraction, and Learning Inefficiency to Support Collaborative Learning in Industry," *Gr. Decis. Negot.*, vol. 30, no. 1, pp. 171–190, Feb. 2021, doi: 10.1007/s10726-020-09711-0.
- [28] L. Tian, J. Liu, Y. Liang, and Y. Wu, "A participatory e-planning model in the urban renewal of China: Implications of technologies in facilitating planning participation," *Environ. Plan. B Urban Anal. City Sci.*, vol. 50, no. 2, pp. 299–315, Feb. 2023, doi: 10.1177/23998083221111163.
- [29] C. Xu, "Analysis of ice and snow tourism service quality improvement strategy based on grey correlation model in the perspective of sharing economy," *Appl. Math. Nonlinear Sci.*, vol. 9, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.2478/amns.2023.2.00904.
- [30] N. T. Duy, S. R. Mondal, N. T. T. Van, P. T. Dzung, D. X. H. Minh, and S. Das, "A Study on the Role of Web 4.0 and 5.0 in the Sustainable Tourism Ecosystem of Ho Chi Minh City, Vietnam," *Sustainability*, vol. 12, no. 17, p. 7140, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12177140.
- [31] J. Wessel, "Evaluating the transport-mode-specific trade effects of different transport infrastructure types," *Transp. Policy*, vol. 78, pp. 42–57, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.tranpol.2019.04.002.
- [32] A. Torres-Delgado, F. López Palomeque, B. Elorrieta Sanz, and X. Font Urgell, "Monitoring sustainable management in local tourist destinations: performance, drivers and barriers," *J. Sustain. Tour.*, vol. 31, no. 7, pp. 1672–1693, Jul. 2023, doi: 10.1080/09669582.2021.1937190.
- [33] A. Alsiehem, "Events-Based Service Quality and Tourism Sustainability: The Mediating and Moderating Role of Value-Based Tourist Behavior," *Sustainability*, vol. 15, no. 21, p. 15303, Oct. 2023, doi: 10.3390/su152115303.
- [34] J. Park and E. Jeong, "Service Quality in Tourism: A Systematic Literature Review and Keyword Network Analysis," *Sustainability*, vol. 11, no. 13, p. 3665, Jul. 2019, doi: 10.3390/su11133665.
- [35] L. Wei and S. Ullah, "International tourism, digital infrastructure, and CO2 emissions: fresh evidence from panel quantile regression approach," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, vol. 29, no. 24, pp. 36273–36280, May 2022, doi: 10.1007/s11356-021-18138-2.
- [36] S. Lee, "Infrastructure Service Assessment Model Based on a Service Quality Gap Model—Focused on South Korea," *Sustainability*, vol. 14, no. 1, p. 577, Jan. 2022, doi: 10.3390/su14010577.
- [37] A. Y.-P. Chang and K.-P. Hung, "Development and validation of a tourist experience scale for cultural and creative industries parks," *J. Destin. Mark. Manag.*, vol. 20, p. 100560, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.jdmm.2021.100560.
- [38] E. J. Kim, S. M. Park, and H. W. Kang, "Changes in leisure activities of the elderly due to the COVID-19 in Korea," *Front. Public Heal.*, vol. 10, Aug. 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.966989.

-
- [39] O. Rageth, *Women, leisure and tourism: self-actualization and empowerment through the production and consumption of experience*. UK: CABI, 2021. doi: 10.1079/9781789247985.0000.
 - [40] Y. Yao, Y. Liu, and L. Huang, "Motivation-based segmentation of yachting tourists in China," *Asia Pacific J. Tour. Res.*, vol. 26, no. 3, pp. 245–261, Mar. 2021, doi: 10.1080/10941665.2020.1851274.
 - [41] T.-M. Yeh, S.-H. Chen, and T.-F. Chen, "The Relationships among Experiential Marketing, Service Innovation, and Customer Satisfaction—A Case Study of Tourism Factories in Taiwan," *Sustainability*, vol. 11, no. 4, p. 1041, Feb. 2019, doi: 10.3390/su11041041.
 - [42] P. Heintzman, "Introduction to theme issue on leisure places and spaces," *J. Leis. Res.*, vol. 54, no. 1, pp. 1–2, Jan. 2023, doi: 10.1080/00222216.2022.2160621.
 - [43] R. Volyne, "Toolkit for improving the quality of tourism and recreational services in the context of the development of the digital economy," *Theor. Econ.*, no. 3, pp. 95–107, Mar. 2024, doi: 10.52957/2221-3260-2024-3-95-107.
 - [44] G. Prayag, M. J. Gannon, B. Muskat, and B. Taheri, "A serious leisure perspective of culinary tourism co-creation: the influence of prior knowledge, physical environment and service quality," *Int. J. Contemp. Hosp. Manag.*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Jun. 2020, doi: 10.1108/IJCHM-10-2019-0897.
 - [45] N. Prasetyo, S. Filep, and A. Carr, "Towards culturally sustainable scuba diving tourism: an integration of Indigenous knowledge," *Tour. Recreat. Res.*, vol. 48, no. 3, pp. 319–332, May 2023, doi: 10.1080/02508281.2021.1925830.
 - [46] I. Cavallini, D. Marzo, L. Scaccia, S. Scipioni, and F. Niccolini, "Scuba diving tourism and the challenge of sustainability: evidence from an explorative study in North African-Mediterranean countries," *EuroMed J. Bus.*, Apr. 2023, doi: 10.1108/EMJB-04-2022-0085.
 - [47] A. N. Bahasoan, C. Anwar, R. I. Khaldun, and T. H. B. Tahawa, "The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 343, no. 1, p. 012253, Oct. 2019, doi: 10.1088/1755-1315/343/1/012253.
 - [48] K. M. Nelson, S. Partelow, and A. Schlüter, "Nudging tourists to donate for conservation: Experimental evidence on soliciting voluntary contributions for coastal management," *J. Environ. Manage.*, vol. 237, pp. 30–43, May 2019, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.02.003.
 - [49] C.-H. Lee, Y.-J. Chen, Y.-S. Huang, and C. Chen, "Incorporating Integrative Perspectives into Impact Reduction Management in a Reef Recreation Area," *Water*, vol. 12, no. 1, p. 111, Dec. 2019, doi: 10.3390/w12010111.
 - [50] M. Carvache-Franco, A. G. Viquez-Paniagua, W. Carvache-Franco, A. Pérez-Orozco, and O. Carvache-Franco, "Segmentation by Motivations in Sustainable Coastal and Marine Destinations: A Study in Jacó, Costa Rica," *Sustainability*, vol. 14, no. 14, p. 8830, Jul. 2022, doi: 10.3390/su14148830.
 - [51] A. Papu *et al.*, "First Study on Marine Heterobranchia (Gastropoda, Mollusca) in Bangka Archipelago, North Sulawesi, Indonesia," *Diversity*, vol. 12, no. 2, p. 52, Jan. 2020, doi: 10.3390/d12020052.
 - [52] A. Luthfi, I. M. A. W. W. Putra, A. Roziqin, M. F. Naufal, A. R. Hidayat, and Y. A. Widjaja, "Government's Role in Managing Marine Tourism in Tanjung Bira Bulukumba Regency:

- Collaborative Governance Perspective," *J. Public Policy*, vol. 9, no. 3, p. 183, Jul. 2023, doi: 10.35308/jpp.v9i3.7543.
- [53] N. Undap *et al.*, "First Survey of Heterobranch Sea Slugs (Mollusca, Gastropoda) from the Island Sangihe, North Sulawesi, Indonesia," *Diversity*, vol. 11, no. 9, p. 170, Sep. 2019, doi: 10.3390/d11090170.
- [54] B. Hollstein, T. Töpfer, and J. Pfeffer, "Collecting egocentric network data with visual tools: A comparative study," *Netw. Sci.*, vol. 8, no. 2, pp. 223–250, Jun. 2020, doi: 10.1017/nws.2020.4.
- [55] K. Imai, I. S. Kim, and E. H. Wang, "Matching Methods for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data," *Am. J. Pol. Sci.*, vol. 67, no. 3, pp. 587–605, Jul. 2023, doi: 10.1111/ajps.12685.
- [56] É. Martin, D. Bergeron, and I. Gaboury, "The Use of Vignettes to Improve the Validity of Qualitative Interviews for Realist Evaluation," *Qual. Health Res.*, Mar. 2024, doi: 10.1177/10497323241237411.
- [57] A. C. Eldh, J. Rycroft-Malone, T. van der Zijpp, C. McMullan, and C. Hawkes, "Using Nonparticipant Observation as a Method to Understand Implementation Context in Evidence-Based Practice," *Worldviews Evidence-Based Nurs.*, vol. 17, no. 3, pp. 185–192, Jun. 2020, doi: 10.1111/wvn.12449.
- [58] E. F. Papavasileiou and I. Dimou, "Evidence of construct validity for work values using triangulation analysis," *EuroMed J. Bus.*, May 2024, doi: 10.1108/EMJB-10-2023-0287.
- [59] F. Fofana, P. Bazeley, and A. Regnault, "Applying a mixed methods design to test saturation for qualitative data in health outcomes research," *PLoS One*, vol. 15, no. 6, p. e0234898, Jun. 2020, doi: 10.1371/journal.pone.0234898.
- [60] F. Cabitza, L. G. Dui, and G. Banfi, "PROs in the wild: Assessing the validity of patient reported outcomes in an electronic registry," *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 181, p. 104837, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.cmpb.2019.01.009.
- [61] Y. Chatkaewnapanon and J. M. Kelly, "Community arts as an inclusive methodology for sustainable tourism development," *J. Place Manag. Dev.*, vol. 12, no. 3, pp. 365–390, Aug. 2019, doi: 10.1108/JPM-D-09-2017-0094.
- [62] D. Ottaviani, M. Demiröz, H. Szemző, and C. De Luca, "Adapting Methods and Tools for Participatory Heritage-Based Tourism Planning to Embrace the Four Pillars of Sustainability," *Sustainability*, vol. 15, no. 6, p. 4741, Mar. 2023, doi: 10.3390/su15064741.
- [63] L. Sturiale, A. Scuderi, G. Timpanaro, and B. Matarazzo, "Sustainable Use and Conservation of the Environmental Resources of the Etna Park (UNESCO Heritage): Evaluation Model Supporting Sustainable Local Development Strategies," *Sustainability*, vol. 12, no. 4, p. 1453, Feb. 2020, doi: 10.3390/su12041453.
- [64] C. Brooks, E. Waterton, H. Saul, and A. Renzaho, "Exploring the relationships between heritage tourism, sustainable community development and host communities' health and wellbeing: A systematic review," *PLoS One*, vol. 18, no. 3, p. e0282319, Mar. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0282319.
- [65] Y. Hermawan, S. Sujarwo, and Y. Suryono, "Learning From Goa Pindul: Community Empowerment through Sustainable Tourism Villages in Indonesia," *Qual. Rep.*, May 2023, doi: 10.46743/2160-3715/2023.5865.

- [66] R. Esichaikul and R. Chansawang, "Community participation in heritage tourism management of Sukhothai historical park," *Int. J. Tour. Cities*, vol. 8, no. 4, pp. 897–911, Dec. 2022, doi: 10.1108/IJTC-03-2021-0035.
- [67] L. Beal, H. Séraphin, G. Modica, M. Pilato, and M. Platania, "Analysing the Mediating Effect of Heritage Between Locals and Visitors: An Exploratory Study Using Mission Patrimoine as a Case Study," *Sustainability*, vol. 11, no. 11, p. 3015, May 2019, doi: 10.3390/su11113015.
- [68] A. Azharunnisa, S. Gupta, and S. Panda, "Craft culture revival through a sustainable approach of integrating tourism with craft promotion: case study of Puri, Odisha," *J. Cult. Herit. Manag. Sustain. Dev.*, vol. 14, no. 3, pp. 397–418, Apr. 2024, doi: 10.1108/JCHMSD-07-2021-0120.
- [69] T.-M. Wut, W.-T. Chan, and S. W. Lee, "Unconventional Entrepreneurship: Women Handicraft Entrepreneurs in a Market-Driven Economy," *Sustainability*, vol. 13, no. 13, p. 7261, Jun. 2021, doi: 10.3390/su13137261.
- [70] A. Wondirad, D. Bogale, and Y. Li, "Practices and challenges of developing handicrafts as a core tourism product in Chenchä and Konso, southern Ethiopia," *Int. J. Cult. Policy*, vol. 28, no. 3, pp. 306–326, Apr. 2022, doi: 10.1080/10286632.2021.1938560.
- [71] H. Özgüt, Ç. Yücelen, N. Güden, and S. Ilkhanizadeh, "Residents' perceptions towards sustainability of cultural resources: the case of great inn," *J. Tour. Cult. Chang.*, vol. 21, no. 2, pp. 207–222, Mar. 2023, doi: 10.1080/14766825.2022.2032116.
- [72] S. Sharma, S. Sinha, and D. Sahoo, "Evolving Host Socio-Demographical Determinants Towards Himalayan Handicraft Industry," *Int. J. Asian Bus. Inf. Manag.*, vol. 12, no. 3, pp. 1–13, Dec. 2021, doi: 10.4018/IJABIM.293276.
- [73] S. K. Deb, P. P. Mohanty, and M. Valeri, "Promoting family business in handicrafts through local tradition and culture: an innovative approach," *J. Fam. Bus. Manag.*, Feb. 2022, doi: 10.1108/JFBM-10-2021-0131.
- [74] A. Wondirad, Y. Kebete, and Y. Li, "Culinary tourism as a driver of regional economic development and socio-cultural revitalization: Evidence from Amhara National Regional State, Ethiopia," *J. Destin. Mark. Manag.*, vol. 19, p. 100482, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jdmm.2020.100482.
- [75] Lia Sabtuti, Yunikewaty, and Tresia Kristiana, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat disekitar Obyek Wisata Taman Nasional Sebangau Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya," *J. Environ. Manag.*, vol. 1, no. 3, pp. 241–252, Oct. 2020, doi: 10.37304/jem.v1i3.2570.